

PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Oleh:

Lilis Siti Badriah

E-mail: ummililis@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

The development of innovation and entrepreneurship is an important requirement in creating Indonesia's competitiveness in the era of globalization, especially ASEAN Economic Community by 2015. To create a competitive advantage need to pay attention to three things: knowledge, creativity, and innovation. Knowledge will be the basis of a person or group explore creativity, as the basis to a variety of innovations. Innovation that comes from knowledge and creativity to be able to produce something new that does have certain characteristics. This will be a source of competitive advantage. Thus the availability of good quality of human capital is very important.

Keywords: *Innovation, Entrepreneurship, competitiveness, Globalization, human capital*

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Perdagangan internasional dapat meningkatkan produksi dan konsumsi barang dan jasa (*dokrin vent for surplus*) (Jhingan, 2004). Keberadaan perdagangan internasional dapat memperluas pasar domestik, meningkatkan teknologi, dan meningkatkan produksi barang/jasa yang diminati di luar negeri. Bagi konsumen, keterbukaan ekonomi melalui masuknya barang-barang dari luar negeri akan semakin menambah preferensi konsumen, harga bagi konsumen dimungkinkan untuk bisa menjadi lebih murah (Nicholson, 2000).

Integrasi ekonomi dapat memberikan manfaat manakala kita mampu menyikapi keterbukaan yang terjadi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dikembangkan oleh suatu negara tidak hanya sekedar mengandalkan keunggulan komparatif, tetapi bagaimana mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang menekankan kepada pentingnya kreatifitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan inovasi dan kewirausahaan.

Dengan menekankan pada keunggulan kompetitif, maka suatu negara akan memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dalam percaturan global. Keunggulan kompetitif akan sangat menentukan kemampuan suatu negara untuk *survive* dalam era globalisasi perekonomian tersebut.

Untuk mendukung terciptanya keunggulan kompetitif tetap perlu peran pemerintah melalui berbagai regulasi yang relevan dalam fungsinya sebagai regulator untuk stabilisasi, alokasi dan distribusi. Peran serta pemerintah bisa menjadi komplemen bagi mekanisme pasar yang terjadi. Karena kita tidak dapat mengandalkan sepenuhnya pada sistem perekonomian pasar dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pasar karena adanya inefisiensi (Nicholson, 2000).

Melihat kesuksesan integrasi ekonomi Eropa dalam bentuk pasar tunggal yang dimulai sejak 1950-an telah mempengaruhi wilayah ASEAN untuk juga mengikuti langkah tersebut melalui wujud Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community*) yang diwacanakan sejak tahun 1997 dan rencana implementasinya pada tahun 2015. Diharapkan MEA ini akan menjadi fondasi kokoh bagi perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Untuk mendapatkan manfaat dari MEA maka Indonesia harus betul-betul mempersiapkan diri agar mampu bersaing di pasar global dengan memperhatikan pentingnya memiliki keunggulan kompetitif, yang menekankan pada pentingnya teknologi dan kualitas SDM sehingga produktifitas akan meningkat dan akhirnya mampu menciptakan efisiensi ekonomi. Salah satu kunci dalam mewujudkan keunggulan kompetitif adalah melalui pengembangan inovasi dan kewirausahaan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pentingnya inovasi dan kewirausahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan di Indonesia?

LANDASAN TEORI

1. *Competitive Advantage*

Kesejahteraan suatu bangsa itu harus diciptakan bukan diwariskan. Dalam era globalisasi, untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka suatu negara harus memiliki keunggulan kompetitif sehingga akan mampu memiliki daya saing. Kemampuan kompetitif suatu bangsa tergantung kepada kapasitas industrinya untuk terus menerus melakukan inovasi. Dasar kompetitif harus terus menerus melakukan penciptaan dan asimilasi pengetahuan. Keunggulan kompetitif diciptakan dan diperlihara keberlanjutannya melalui proses pemanfaatan potensi lokal secara intensif. Keberhasilan suatu perusahaan untuk mewujudkan keunggulan kompetitif diperoleh melalui aktivitas inovasi baik dengan penggunaan teknologi baru atau dengan cara-cara baru. Kegiatan inovasi tidak hanya sekedar memunculkan sesuatu yang baru tetapi harus meliputi juga investasi dalam *skill* dan pengetahuan sebagaimana halnya investasi dalam aset fisik. Daya saing nasional telah

menjadi salah satu pusat perhatian bagi pemerintah dan juga industri. Terdapat 4 atribut terkait daya saing nasional, yaitu (Porter, 1990):

a) Kondisi faktor produksi, seperti keterampilan tenaga kerja dan kesediaan infrastruktur yang diperlukan dalam suatu industri tertentu, b). Kondisi permintaan, yaitu sifat alamiah dari permintaan rumah tangga terhadap produk industri dan jasa, c). Industri terkait dan pendukung, yaitu keberadaan atau ketiadaan dari industri pemasok di suatu negara atau industri lain yang berhubungan yang mampu bersaing secara internasional, c). Strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Kondisi di pemerintahan yang ada berkaitan dengan bagaimana perusahaan diciptakan, dilaksanakan, dan dikelola serta sifat persaingan domestik.

Faktor-faktor tersebut menciptakan lingkungan nasional dimana perusahaan dilahirkan dan belajar untuk bersaing. Keempat faktor ini dikenal dengan “*The Diamond of National Advantage*”. Menurut Porter (1990), diamond tersebut merupakan sebuah sistem. Keempat faktor dalam diamond ini saling mempengaruhi. Dalam rangka menciptakan daya saing nasional, peran pemerintah masih diperlukan secara proporsional. Peran pemerintah yang sebenarnya adalah sebagai katalisator dan penantang, yaitu dengan mendorong perusahaan untuk meningkatkan aspirasi mereka dan meningkatkan kemampuan bersaingnya meskipun prosesnya sulit.

Dalam penciptaan keunggulan kompetitif, yang tidak kalah penting adalah peran kepemimpinan dalam perusahaan/organisasi. Pemimpin percaya perlunya perubahan, dia mendorong organisasi untuk melakukan inovasi secara terus menerus, mereka mengakui perlunya tekanan dan tantangan.

2. *Endogenous growth theory*

Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh faktor-faktor di dalam proses produksi, misalnya dengan meningkatkan investasi atau memperkenalkan perubahan teknologi. Dalam teori pertumbuhan endogen, teknologi bersifat endogen, tidak terjadi *diminishing return*, dan diasumsikan bahwa *marginal return of capital* bersifat konstan karena *knowledge* dianggap sebagai sejenis modal yang dianggap tidak mengalami *diminishing return*. Dengan asumsi bahwa *marginal return of capital* adalah konstan, maka teori pertumbuhan endogen lebih mengesankan tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Mankiw, 2007).

Pengembangan lebih lanjut dari model dasar teori pertumbuhan endogen, bahwa perekonomian memiliki dua sektor, yaitu sektor produksi (perusahaan manufaktur) dan sektor *Riset and Development*. Sektor produksi menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi dan investasi dalam modal fisik. Sedangkan sektor R&D menghasilkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan digunakan secara bebas pada kedua sektor tersebut. Teori pertumbuhan endogen dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena adanya variabel penciptaan *knowledge* pada sektor R&D yang bersifat endogen. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan meningkat secara endogen karena penciptaan ilmu pengetahuan di sektor R&D tidak pernah surut. Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen, model pertumbuhan Romer yang secara spesifik membahas alokasi sumberdaya ke sektor R&D dibangun dari fondasi mikroekonomi.

Dalam model ini, R&D dilakukan dengan memaksimalkan profit dari faktor-faktor ekonomi. R&D mendorong pertumbuhan yang pada gilirannya mempengaruhi insentif untuk mencurahkan sumber daya terhadap R&D (Romer, 2012).

3. Ekonomi inovasi

Josep Aolis Schumpeter (dalam Jhingan, 2004) menyatakan bahwa “pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus dalam suatu aliran sirkuler dan muncul diatas kehidupan perdagangan dan industri. Unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru yang didalamnya terkandung berbagai kemungkinan yang ada dimana kombinasi baru ini muncul dalam bentuk inovasi”. Dalam hal ini Schumpeter menekankan pada pentingnya peranan inovator, yang ditujukan kepada para pengusaha. Inovator dianggap dapat menemukan teknologi-teknologi baru yang mampu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.

Sejalan dengan Schumpeter, Oslo Manual (2005) dalam Zuhail (2013) mendefinisikan inovasi adalah “*the implementation of a new or signifacantly improved product (goods or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace organization or external relation*”. Sedangkan “ekonomi inovasi dicirikan oleh pergeseran dan pertumbuhan berbasis keunggulan komparatif yang ditopang ketersediaan tenaga kerja, sumberdaya alam, dan sumber keuangan murah menuju pertumbuhan berbasis keunggulan kompetitif yang didukung oleh eksploitasi knowledge, teknologi, dan inovasi” (Zuhail, 2013). Dengan demikian, inovasi akan mampu terwujud ketika seseorang memiliki pengetahuan (*knowledge*). Pengetahuan ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan kemampuan seseorang dalam berinovasi.

Menurut Schumpeter dalam Dhewanto, dkk (2013), “inovasi memerlukan sebuah proses dan menghasilkan sesuatu dalam waktu yang bersamaan....” sehingga dari pernyataan tersebut diimplikasikan bahwa inovasi memiliki dua sifat dasar yaitu sebagai sebuah proses dan sebagai sebuah hasil”.

4. Kewirausahaan

“Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar” (Longenecker et al., 2001). Menurut Kasmir (2007), “Ciri dan sifat watak seorang wirausahawan, sebagai berikut : Disiplin, Komitmen Tinggi, Jujur, Kreatif dan Inovatif, Mandiri, Realistis. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil: Memiliki visi dan tujuan yang jelas; Inisiatif dan selalu proaktif; Berorientasi pada prestasi; Berani mengambil risiko; Kerja keras. Bertanggungjawab; Komitmen pada berbagai pihak; Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak”.

Menurut Priyanto (2009), “*entrepreneurship* merupakan hasil interaksi, integrasi dan refleksi ide, ekspektasi dan aktivitas satu orang dengan yang lainnya. Aspek-aspek tersebut merupakan dimensi inti dari *enterepreuneur competence*. Jadi pengembangan kemampuan kewirausahaan didasarkan pada aspek pembelajaran pertumbuhan individu.

Pengembangan kemampuan kewirausahaan merupakan persoalan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama sinergis antara perguruan tinggi, pengusaha dan pemerintah untuk menghasilkan model pengembangan kemampuan kewirausahaan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan Fauzi (2013) yang mengatakan bahwa “pengembangan inovasi produk suatu invensi melibatkan 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional, yaitu : (1) pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator; (2) pelaku usaha / industri sebagai pengguna hasil invensi, dan (3) lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk invensi”

Menurut Priyanto (2009), “ada empat tujuan dalam pengembangan kemampuan kewirausahaan yaitu pengembangan motivasional, pengembangan pengetahuan, pengembangan keahlian (*skill*) dan pengembangan kemampuan (*ability*). Oleh karena itu model pengembangan kemampuan kewirausahaan (materi dan metode) harus diarahkan untuk mencapai 4 tujuan tersebut. Pendidikan kewirausahaan paling awal akan terjadi pada lingkungan”.

PEMBAHASAN

Fenomena Empiris

Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang akan diimplementasikan mulai tahun 2015. Dalam era ini, AEC akan menjadi pasar tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara negara ASEAN. Hal ini akan membuka peluang Indonesia untuk memperluas pasarnya di kawasan ASEAN (ditjenkpi.kemendag.go.id/).

Dengan adanya keterbukaan ekonomi dan menghadapi pasar tunggal, maka untuk mampu bertahan dalam kondisi demikian, Indonesia harus memiliki keunggulan kompetitif. Untuk mampu bersaing, maka perlu ada perubahan paradigma pembangunan bahwa “pendorong pertumbuhan ekonomi bukan lagi ditentukan oleh akumulasi modal dan sumber daya alam seperti pendapat kaum Klasik, tetapi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan dan inovasi” (Zuhal, 2013). Hal ini seperti diprediksi oleh Joseph Schumpeter (1942) bahwa dunia mulai bergerak meninggalkan ekonomi berbasis sumber daya alam memasuki era ekonomi inovasi (*innovation economy*). Pergerakan ini tampak dari perubahan kontribusi dari tenaga kerja dan modal serta inovasi teknologi terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Faktor terhadap Pertumbuhan Ekonomni

	1970-an	1990-an	Awal 2000
Tenaga kerja, modal	79,2%	63,6%	58,5%
Innovasi teknologi	20,8%	36,1%	41,5%

Sumber : *Science & Technology Polici Institute* (2007) dalam Zuhal, 2013.

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa pendapat Schumpeter menunjukkan benar adanya. Oleh karena itu, pengembangan inovasi teknologi merupakan syarat mutlak untuk memasuki era AEC agar mampu berdaya saing.

Data empiris Indonesia saat ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia selama tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi, berdasarkan data *World Economic Forum "The Global Competitiveness Report 2012-2013"*, seperti terlihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Peringkat Daya Saing Negara-negara ASEAN 2008 dan 2012

No	Negara	2008	2012	Perubahan
1	Singapura	5	2	3
2	Malaysia	21	25	-4
3	Brunei	39	28	11
4	Thailand	34	38	-4
5	Indonesia	55	50	5
6	Filipina	71	65	6
7	Vietnam	70	75	-5
8	Kambodia	109	85	24
9	Timor Leste	129	136	-7

Sumber : *World Economic Forum* dalam Bappenas.go.id

Tabel 3. Indeks Daya Saing Indonesia 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Indeks daya saing	55	54	44	46	50
1. Persyaratan dasar	76	70	60	53	58
2. Penopang efisiensi	49	50	51	56	58
3. Faktor inovasi dan kecanggihan	45	40	37	41	40

Sumber : *World Economic Forum* dalam Bappenas.go.id

Apabila diperhatikan data pada Tabel 2 dan Tabel 3, terlihat bahwa 3 negara ASEAN dengan peringkat daya saing tertinggi secara berurutan adalah Singapura, Malaysia, Brunei. Walaupun pada tahun 2012, Brunei mengalami penurunan peringkat daya saing sebanyak 4 poin tetapi posisinya masih pada urutan tertinggi kedua. Sedangkan Indonesia berada pada urutan ke-5 yang mengalami peningkatan 5 poin dari posisi 55 pada tahun 2008 menjadi 50 pada tahun 2012. Apabila dibandingkan peringkat daya saing tahun 2008 dan 2012, terlihat bahwa lima negara ASEAN mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi dicapai oleh Kambodia sebesar 24 poin dan kemudian Brunei sebesar 11 poin, sedangkan empat negara lainnya mengalami penurunan peringkat daya saing dengan penurunan terbesar dialami oleh Timor Leste sebesar 7 poin.

Walaupun berdasarkan Tabel 2 Indonesia mengalami kenaikan peringkat sebanyak 5 poin dari tahun 2008 ke tahun 2012, tetapi apabila dilihat secara lebih rinci per tahun seperti pada Tabel 3, ternyata peringkat daya saing Indonesia mengalami fluktuasi, bahkan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 terus mengalami penurunan, Meskipun data WEF 2013 menunjukkan bahwa peringkat Indonesia pada tahun 2013 kembali naik menjadi peringkat 38 (Tempo.co, 2013). Hal ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan dunia usaha

untuk mengevaluasi mengenai penyebab fluktuasinya daya saing tersebut dan perlu upaya untuk mengatasinya agar terus mampu meningkatkan daya saing Indonesia.

Penilaian indeks daya saing menurut WEF ditentukan berdasarkan tiga hal, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, faktor inovasi dan kecanggihan. Apabila dilihat pada Tabel 3, untuk unsur persyaratan dasar dan faktor inovasi dan kecanggihan, Indonesia mengalami peringkat yang cenderung meningkat, sedangkan untuk penopang efisiensi cenderung menurun. Penurunan penopang efisiensi ini dapat terkait dengan adanya berbagai hambatan yang masih dihadapi di Indonesia. Berdasarkan laporan periodik WEF 2012 disebutkan bahwa faktor-faktor penghambat untuk berusaha di Indonesia antara lain: hambatan peraturan perburuhan, keterbatasan infrastruktur, korupsi, etika kerja buruh, dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien.

Data empiris lain menunjukkan, berdasarkan *World Bank Report* (2008) menunjukkan data perbandingan pengeluaran untuk keperluan R & D pada tahun 2008, sebagai share terhadap GDP masing-masing negara adalah sebagai berikut: German (2,68%), Japan (3,45%), Korea (3,36%), Brazil (1,08%), Australia (2,35%), Israel (4,66%), China (1,47%) dan Indonesia (0,08%). Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran untuk melakukan inovasi di Indonesia masih sangat rendah.

Bahkan apabila dilihat dari posisi Indonesia dalam indeks inovasinya, pada tahun 2012, berdasarkan data INSEAD & WIPO (2012) (www.globalinnovationindex.org/gii/), menempati urutan ke-100, dengan skor 28,1. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain, peringkat Indonesia ini berada dibawah Singapura di urutan ke-3 dengan skor 63,5, Malaysia di urutan ke-32 dengan skor 45,9, Thailand di urutan ke-57 dengan skor 36,9, dan Philipina di urutan ke-95 dengan skor 29,0. Peringkat Indonesia tersebut berada di atas Kamboja yang berada di urutan ke-129 dengan skor 23,4.

Pentingnya inovasi dan kewirausahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif.

Untuk memiliki kemampuan daya saing, maka kita perlu menghasilkan sesuatu yang memiliki ciri khas tertentu, baik dari segi jenis, bentuk, maupun kualitas. Untuk mendukung daya saing perlu menekankan pentingnya *competitive advantage* yang muncul dari adanya kreatifitas dan kualitas sumber daya manusia yang baik dan memiliki kompetensi yang tinggi. Kreatifitas dapat diwujudkan dalam berbagai inovasi yang juga dapat tercipta melalui kewirausahaan, sebagaimana disampaikan oleh Schumpeter. Karena salah satu syarat untuk menjadi wirausaha berhasil, maka seseorang harus mampu berinovasi. Kemampuan inovasi akan dapat diperoleh manakala seseorang memiliki pengetahuan (*knowledge*).

Semakin majunya perekonomian negara-negara seperti Korea, China, Singapura disebabkan karena mereka lebih mengedepankan ekonomi inovasi dalam menetapkan strategi pembangunannya. Disitulah pentingnya inovasi. Jadi dengan demikian, untuk mampu menciptakan keunggulan kompetitif maka 3 hal yang diperlukan, yaitu *knowledge*, kreatifitas, dan inovasi. *Knowledge* akan menjadi dasar menggali kreatifitas seseorang atau kelompok, dimana dengan dasar kreatifitas tersebut seseorang atau kelompok mampu melakukan berbagai macam inovasi. Selanjutnya, inovasi yang bersumber dari *knowledge* dan kreatifitas akan mampu menghasilkan sesuatu yang baru yang memang memiliki ciri khas tertentu. Inilah yang akan menjadi sumber dari keunggulan kompetitif.

Inovasi dapat dianggap sebagai proses berbasis pengetahuan. Andreeva dan Kianto (2011) menyatakan bahwa “proses inovasi merupakan hasil dari proses pengetahuan dalam organisasi, dimana proses pengetahuan menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan berinovasi jangka panjang”.

Oleh karena itu, sesuatu hal yang tak kalah penting dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing adalah ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang baik (*human capital*). Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pengembangan pendidikan baik secara formal maupun informal.

Kebijakan yang Dilakukan

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi era AEC ini, baik yang terkait dengan pengembangan pengetahuan dan inovasi, maupun kewirausahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Kebijakan dalam bidang pendidikan

Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, pemerintah melakukan berbagai kebijakan kemudahan akses pendidikan kepada masyarakat, antara lain:

a. Kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS)

Berdasarkan peraturan Mendiknas No. 69 tahun 2009, BOS merupakan program pemerintah yang menyediakan dana operasional non personalia dalam rangka menuntaskan wajib belajar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar warga negara usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa adanya pungutan biaya. Tujuan program BOS secara umum adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu (www.bos.kemdikbud.go.id).

Disamping program BOS, upaya peningkatan akses pendidikan buat masyarakat yang putus sekolah pun diberikan dalam bentuk adanya program penyetaraan pendidikan melalui kejar paket A (untuk penyetaraan SD), kejar paket B (untuk penyetaraan SMP/MTs) dan kejar paket C (untuk penyetaraan SMA/MA). Bahkan untuk memberikan peluang siswa miskin yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sampai perguruan tinggi, pemerintah menerapkan program beasiswa Bidikmisi. Disamping beasiswa dari pemerintah, terdapat pula beasiswa yang diberikan oleh LSM maupun perusahaan-perusahaan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap upaya pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keberadaan berbagai fasilitas dan program di bidang pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, tentu saja memberikan akses yang cukup luas bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Keberhasilan ini antara lain dapat terlihat dari indikator pendidikan seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Pendidikan di Indonesia 1994-2013

Indikator	1994	2013	Rata-rata selama 1994-2013
PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL			
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	94.06	98.29	96.41
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	72.39	90.48	81.68
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	45.31	63.27	52.54
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	12.80	19.88	12.82
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	107.13	107.61	107.57
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	64.36	85.54	78.77
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	43.04	65.78	53.54
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	10.14	22.79	12.71
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92.11	95.47	92.90
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	50.03	73.56	62.67
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	33.22	53.74	41.55
Angka Partisipasi Murni (APM) PT	7.92	17.92	9.48

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan data pada Tabel 4, terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan masyarakat termasuk kebijakan BOS sudah mampu menunjang peningkatan angka partisipasi pendidikan formal, baik dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS) berbagai kategori usia, angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi Murni (APM) pada berbagai jenjang pendidikan. APK, APS, dan APM untuk tingkat usia SD/MI menunjukkan angka tertinggi kemudian disusul oleh tingkat SMP/MTs. Hal ini membuktikan bahwa tujuan dari upaya wajib belajar pendidikan dasar dapat tercapai. Sedangkan untuk APK, APS, APM jenjang Perguruan tinggi adalah yang paling rendah, walaupun pada tahun 2013 untuk semua APK, APS, dan APM pada jenjang PT menunjukkan peningkatan.

b. Implementasi kurikulum 2013.

Semangat pencetus kurikulum 2013 adalah gagasan bahwa pendidikan kunci pembangunan sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono. Boediono menganggap bahwa pendidikan sebagai kunci pembangunan harus mampu memberikan kompetensi kepada anak didik berupa kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, kemampuan berkomunikasi,

kemampuan mencoba mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kemampuan berpikir jernih dan kritis, dan memiliki minat luas mengenai hidup.

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kurikulum KTSP 2006, terdapat penambahan kompetensi baru dalam pengembangan kurikulum 2013, yaitu : sikap ilmiah, peran Indonesia dalam memasuki era globalisasi internasional, ketahanan diri, adaptasi sosial, sehat mental dan sosial, sastra, serta kerukunan (Subandi, 2013)

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan menekankan pada *competencies based curriculum approach*, bukan lagi pada *standard based curriculum approach*.

2. Kebijakan di bidang inovasi dan pengembangan kewirausahaan

Dalam upaya pengembangan inovasi, Iskandar (2013) mengemukakan terdapat 6 kerangka kebijakan inovasi, antara lain : “mengembangkan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM, menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi, mendorong budaya inovasi, menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi, penyelarasan dengan perkembangan global”. Dalam rangka pengembangan wirausaha, inovasi yang dilakukan antara lain dalam bidang hukum dan kelembagaan, pengembangan SDM, pengelolaan sumber daya, pengembangan infrastruktur, peningkatan daya saing, penciptaan iklim investasi, perbaikan regulasi, pengembangan produk, proses, dan perangkat industri (Fauzi, 2013).

Kerangka kebijakan maupun program prioritas baik dalam inovasi apabila dijalankan dengan tepat, akan sangat mendukung bagi kesiapan Indonesia dalam era AEC. Pengembangan SDM menjadi syarat mutlak bagi penciptaan *human capital* yang menjadi pelaku inovasi. Demikian juga pengembangan industri khususnya UKM, juga merupakan hal yang relevan dilakukan mengingat Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam hal UKM dan telah terbukti selama ini UKM khususnya usaha kecil lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis dan mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang relatif banyak mencapai 10,3 juta orang (2013).

Program pengembangan UKM telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM antara lain: program *One Village One Product* (OVOP), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Lembaga Layanan Pemasaran, dan pelatihan terpadu.

Kebijakan di bidang inovasi dan kewirausahaan juga banyak dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi. IPB dianggap sebagai salah satu perguruan tinggi yang memberikan kontribusi inovasi paling prospektif, menurut data Kemenristek 2008-2012 dari 21% pada tahun 2008 menjadi 46,1% pada tahun 2012 (Fauzi, 2013). Inovasi yang telah dilakukan antara lain inovasi dalam bidang pangan, perikanan, peternakan, kehutanan, kesehatan, dan energi.

Inovasi lain juga dilakukan oleh Universitas Jenderal Soedirman dalam bentuk peningkatan pelayanan konsultasi, pendampingan, dan pelatihan bagi UMKM dan LSM yang dilakukan oleh Pusat Inkubasi Bisnis, peningkatan jumlah desa binaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dari berbagai fakultas, berhasil diluncurkannya benih padi varietas unggul dengan nama INPAGO UNSOED 1 yang merupakan padi gogo aromatik, produksi tinggi, pulen, dan wangi yang

merupakan hasil penemuan Prof. Totok Agung, Ph.D dan Prof. Dr. Suwanto dari Fakultas Pertanian Unsoed, Pengembangan budidaya kepiting sistem tabung oleh Prof. Edi Yuwono, Ph.D dari Fakultas Biologi, Penemuan BIO P60 sebagai pestisida ramah lingkungan oleh Prof. Loekas, Ph.D, inovasi teknologi pengembangan lahan pasir pantai sebagai sentra hortikultura masa depan yaitu budidaya kubis bunga di Pantai Jetis Cilacap, dan bawang merah di Pantai Ketawang Purworejo, penemuan teknologi pendeteksi dini katarak dengan kamera digital dengan menggunakan *specular reflection methode*, oleh Dr. Eng. Retno Supriyati dari Fakultas Teknik bekerja sama dengan *Nara Institute of Science and Technology* (LPPM Unsoed, 2012).

Kebijakan lain yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan kewirausahaan adalah melalui kemudahan akses permodalan bagi usaha kecil dan pelatihan serta pendampingan melalui program Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan bagi usaha kecil yang *feasible* tetapi tidak *bankable* dan program PNPM baik perdesaan maupun perkotaan, disamping melakukan pendampingan dan pelatihan.

KESIMPULAN

Kemampuan daya saing merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki Indonesia dalam menghadapi Globalisasi, khususnya MEA 2015. Untuk mendukung daya saing perlu menekankan pentingnya *competitive advantage* yang muncul dari adanya kreatifitas dan kualitas sumber daya manusia yang baik dan memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk mampu menciptakan keunggulan kompetitif maka 3 hal yang diperlukan, yaitu *knowledge*, kreatifitas, dan inovasi. *Knowledge* akan menjadi dasar menggali kreatifitas seseorang atau kelompok, sebagai dasar melakukan berbagai inovasi. Inovasi yang bersumber dari *knowledge* dan kreatifitas akan mampu menghasilkan sesuatu yang baru yang memang memiliki ciri khas tertentu. Inilah yang akan menjadi sumber dari keunggulan kompetitif. Dengan demikian ketersediaan kualitas *human capital* yang baik sangat diperlukan.

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi era AEC ini, baik yang terkait dengan pengembangan pengetahuan dan inovasi, maupun kewirausahaan. antara lain: kebijakan dalam bidang pendidikan melalui BOS, implementasi Kurikulum 2013 dikembangkan dengan menekankan pada *competencies based curriculum approach*, bukan lagi pada *standard based curriculum approach*. Kebijakan ini sudah mampu menunjang peningkatan angka partisipasi pendidikan formal, terutama di jenjang pendidikan dasar. Disamping itu juga pemerintah telah melakukan kebijakan di bidang inovasi dan pengembangan kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreeva, Tatiana and Aino Kianto, 2011. *Knowledge Processes, Knowledge Intensity and Innovation: A Moderated Mediation Analysis*, *Journal of Knowledge Managements*, Vol. 15, No. 6. pp. 1016-1034.
- BPS, 2014. *Indikator Pendidikan di Indonesia, 1994-2013*. <http://www.bps.go.id>.
- Dhewanto, dkk. 2013. *Manajemen Inovasi, Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. ANDI, Yogyakarta.
- Fauzi, Anas M, 2013. *Inovasi Untuk Pengembangan Usaha Daerah*. Diskusi KADIN, 5 Maret 2013.
- Iskandar, Marzan A, 2013. *Masukan Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2015-2019*. <http://www.bppt.go.id>.
- Jhingan, ML, 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2007. *Ciri-ciri Wirausaha, Kewirausahaan*. Alfabeta. Bandung.
- Longenecker, Justin G, Carlon W. Moor dan J. William Petty. 2001. *Kewirausahaan : Manajemen Usaha Kecil*. Salemba Empat. Jakarta.
- LPPM Unsoed, 2012. *Profile of Institute for Research and Community Services Jenderal Soedirman University*, Unsoed, Purwokerto.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Macroeconomics*, 6th edition. Worth Publisher, Inc. New York.
- Nicholson, Walter, 2000. *Intermediate Microeconomics, And Its Application*, Eight Edition. Harcourt College Publisher.
- Porter, Michael. E, 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. *Harvard Business Review*. March-April 1990.
- Priyanto, Sony Heru. 2009. *Andragogia-Jurnal PNFI*. Volume 1, No 1 - Nopember 2009.
- Romer, David. 2012. *Advanced Macroeconomics. Fourth Edition*. McGraw-Hill. New York.
- Subandi, 2013. *Pengembangan Kurikulum 2013 (Studi analitis dan substantif kebijakan kurikulum nasional)*, *Jurnal Terampil*, Vol 1, No. 1 (2013), www.ejournal.iainradenintan.ac.id.
- Zuhal, 2013. *Gelombang Ekonomi Inovasi Kesiapan Indonesia Berselancar di Era Ekonomi Baru*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [http:// www. Bappenas.go.id](http://www.Bappenas.go.id)

<http://ditjenkpi.kemendag.go.id>. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*.

<http://www.bos.kemdikbud.go.id>. *Program Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2012*.

<http://www.data.worldbank.org>. *World Bank Report (2008)*.

<http://www.globalinnovationindex.org/gii>.